

**KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS PELAKSANA PROGRAM BANTUAN NELAYAN DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019)**

Zulfitri<sup>1</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>2</sup>, Novi Winarti<sup>3</sup>  
Zulpangalila99@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

***Abstract***

*Empowerment is one of the important aspects in social life. In the context of government, the Fisheries Technical Implementation Unit (UPTP) is one of the regional apparatuses that focuses on the fisheries sector. With regard to empowerment, it certainly leads to the fishing community, namely, which in empowering the fishing community through the fishermen's assistance program is one of the goals for the welfare of the community, especially the fishing community. The purpose of this research is to make a study of the empowerment of fishermen that has been applied by the Fisheries Technical Implementation Unit (UPTP) to the fishermen community in Buru Village, Buru District, Karimun Regency, and what is the impact of the lack of fishing business groups in Buru Village. , using Cook and Macaulay theory. The research method used is descriptive qualitative method with 9 informants and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that the Empowerment carried out by the Fishery Technical Implementation Unit (UPTP) for fishing communities in the implementation of the fishermen assistance program in the Buru sub-district was good, where the fishing communities who received assistance through the fisherman assistance program felt helped in the facilities received according to each fisherman's needs. . In addition, there are still some fishing communities in Buru Village who do not receive assistance, this is because they do not have a fishing business group, lack of knowledge in social life, and also because the fishing community does not care about the fishermen's assistance program.*

***Keywords: Empowerment, Fisheries Technical Implementation Unit***

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunggulan di bidang ekonomi, sebagai negara kepulauan, dilihat secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan yang dikelilingi banyak pulau. Potensi laut merupakan kekayaan yang sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, baik secara daerah maupun nasional. Untuk itu tentu membutuhkan program pembangunan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya perikanan memiliki tujuan untuk meningkatkan seluruh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pesisir atau nelayan secara terintegrasi sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan harus diintegrasikan dengan ekonomi lainnya, yaitu bagaimana sikap perhatian Pemerintah dalam mendorong masyarakat nelayan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, Adapun permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah adalah masih banyak terdapat nelayan tradisional yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan tersebut. Penanganan untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat seperti di atas dilakukan dengan kebijakan Pembangunan dibidang perikanan oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari aspek pendapatan, Nelayan merupakan jenis pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, apalagi pendapatan hasil baik itu perhari, perminggu, perbulan, dan bahkan pertahun, itu sangat sulit di tetapkan. Karena sudah menjadi resiko bagi pekerja sebagai nelayan, yang bekerja setiap harinya untuk memperoleh hasil tangkap dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan wawancara penulis, disini penulis telah menemukan bahwasanya Kecamatan Buru telah merealisasikan Program bagi masyarakat nelayan, yaitu Program Bantuan Perikanan. Fokus utama terhadap Program Bantuan Nelayan ini adalah masyarakat Nelayan dimana pemerintah berupaya membantu dalam hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat nelayan. Prospek terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Nelayan ini sudah menjadi inisiatif bagi pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Buru. Dengan adanya usulan dari masyarakat dalam bentuk Proposal serta memiliki Kelompok Nelayan yang berbadan hukum atau yang disebut dengan Akta Notaris. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melakukan Program Bantuan Nelayan pada awal bulan hingga akhir bulan di Tahun 2019, di antara 2 Desa dan 2 Kelurahan yang ada di lingkungan Kecamatan Buru. peneliti menemukan di antara masing-masing kelompok nelayan yang memperoleh bantuan dari Program tersebut itu sudah akurat sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat. Akan tetapi ada apa dengan masyarakat di kelurahan buru, sangat sedikit jumlah yang mendapatkan bantuan dari Program tersebut. Padahal seperti yang telah di ketahui mayoritas masyarakat yang ada di kelurahan buru itu sebagai nelayan. Padahal, seharusnya dengan adanya Program Bantuan Nelayan ini, masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Buru bisa ikut terbantu. Kemudian terdapat kelompok nelayan yang merupakan gabungan di antara kelurahan ataupun desa. Seharusnya dalam pembentukan kelompok nelayan ini, harus sesama kelurahan atau pun desa, agar lebih efektif dalam aktifitas kelompok nelayan.

Dan berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah seorang masyarakat nelayan yang berada di Kelurahan Buru yang tidak menerima bantuan, Bapak Zainuddin menyatakan banyak masyarakat yang kecewa terhadap hasil dari program bantuan ini, karena mereka menganggap program bantuan nelayan seharusnya menjadi prioritas yang tepat terhadap para nelayan yang telah bertahun-tahun bekerja sebagai nelayan, ini yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah, tapi

sebaliknya malah nelayan yang tergolong mampu, masyarakat yang baru-baru bekerja sebagai nelayan malah dengan mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Melalui Program Bantuan Nelayan berdasarkan persyaratan penerimaannya itu seperti apa? Bukanya berkelompok, lalu kenapa ada yang menerima bantuan secara individu, kemudian terdapat pula kelompok usaha yang di bentuk secara gabungan, tidak satu lingkungan ? dan juga mengapa jumlah perolehan penerimaan bantuan masyarakat nelayan yang berasal dari kelurahan buru itu lebih sedikit? jika pembentukan kelompok usaha nelayan menjadi prioritas terhadap penerimaan bantuan maka perlu adanya pengawasan karena terdapat kelompok yang berisi kerabat dekat, saudara-saudara Sehingga menjadi ladang politik untuk memperoleh bantuan, menjalin hubungan kerjasama dengan membentuk kelompok, kemudian setelah mendapatkan hasil bantuan, maka akan di jual lalu di bagikan sebagai keuntungan. Disini kami sebagai masyarakat nelayan yang beada di lingkungan kelurahan buru tidak begitu tau terkait hal teknis dalam penerimaan bantuan. Kami pun mengharapkan adanya perhatian bagi pemerintah dalam memberikan pengetahuan yang memang patut di lakukan, agar kami juga ikut terbantu dalam bantuan nelayan.

Penyelenggaraan Program Bantuan Nelayan yang di selenggarakan di tahun 2019 masyarakat nelayan telah memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan kerja, penerimaan program bantuan ini harus dengan memiliki Kelompok Usaha Nelayan, namun kelompok yang menerima bantuan dari Program Bantuan Nelayan ini memiliki perbedaan berdasarkan jumlah dari masing-masing anggota di dalam kelompok. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Rekapitulasi Kelompok Usaha Nelayan yang berada di Kecamatan Buru**

NO	NAMA KELOMPOK USAHA NELAYAN	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK
1	KUB. Cahaya Mina Bersama	9 Orang
2	KUB. Kerapu Macan	1 Orang
3	KUB. Panama Pesisir	17 Orang
4	KUB. Rizeki Pantai	8 Orang
5	KUB. Sepakat Kita	11 Orang
6	KUB. Karang Laut	7 Orang
7	KUB. Rukun Aman	9 Orang
8	KUB. Camar Laut	5 Orang
9	KUB. Nelayan Buru	2 Orang
10	KUB. Putra Laut	2 Orang
11	KUB. Ikan Talang	6 Orang
12	KUB. Cahaya Mina	5 Orang
13	KUB. Gumbang Pulau Buru	6 Orang

**Sumber: Olahan Peneliti (2021)**

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwasanya jumlah anggota dari masing-masing kelompok usaha nelayan yang menerima bantuan di tahun 2019 di lingkungan Kecamatan Buru memiliki perbedaan kuantitas, hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan sebagian nelayan mengenai peran adanya kelompok usaha nelayan, serta tidak memperoleh informasi terkait dengan pembentukan kelompok usaha nelayan. Dengan adanya perbedaan kuantitas antar kelompok, seharusnya sudah menjadi inisiatif bagi pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) untuk mencermati permasalahan yang dihadapi.

**Tabel 2. Rekapitulasi Jenis Bantuann Nelayan yang telah di serahkan**

No.	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Sampan Ketinting/Kayu	41 Unit
2	Jaring Anak Ikan	112 Viss
3	Jarring Tenggiri	70 Viss
4	Boot Pancung 15 PK	2 Unit
5	Pompong 2 GT	1 Unit
6	Boot Pancung 40 PK	2 Unit
7	Jarring Tangsi Talang	160 Viss
8	Jarring Gombang	10 Unit

**Sumber: Olahan Peneliti (2021)**

Berdasarkan data di atas, terdapat 8 jenis bantuan dari program bantuan nelayan tahun 2019 yang telah di serahkan berdasarkan kebutuhan bagi masing- masing nelayan. Bantuan sampan ketinting/kayu secara teknis di bagikan perorangan dari masing-masing kelompok sebanyak 1 unit per orang. Terdapat 112 Viss jarring anak ikan yang telah di bagikan, masing-masing anggota kelompok memperoleh sebanyak 12 viss, kemudian 70 Viss jarring tenggiri yang telah diserahkan , dari masing-masing anggota kelompok juga akan memperoleh sebanyak 5 viss perorang, kemudian 2 unit boot pancung yang telah di serahkan, untung boot pancung ini dibagikan hanya kepada 1 kelompok yang hanya terdiri dari 2 orang . kemudian pompong 2 GT diserahkan sebanyak 1 unit, boot pancung 40 PK 2 Unit, 160 Viss jarring tangsi talang yang di serahkan dari masing-masing kelompok sebanyak 21 dan 22 Viss, selanjutnya 10 unit jarring gombang yang telah di serahkan dalam 1 kelompok yang terdiri dari 6 orang, masing-masing akan mendapatkan 1 unit jarring gombang .

Dari penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Program Bantuan Nelayan ini berjalan di Kelurahan Buru, hal ini berguna untuk menilai kinerja dan kontribusi Pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP).

## II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif mencoba memahami dan menerobos gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam situasinya. Bogdan dan Taylor

(1975:5) mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan – catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Objek dan Lokasi Penelitian ini adalah ingin mengetahui “Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) terhadap masyarakat Nelayan yang berada di Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, serta apa yang menjadi dampak kurangnya kelompok usaha nelayan yang berada di Kelurahan Buru. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Buru sebagai kelurahan dengan tingkat masyarakat Nelayan yang sedikit mendapatkan bantuan dari program bantuan nelayan serta sedikit lebih banyak masyarakat nelayan yang tidak memiliki kelompok usaha nelayan diantara Kelurahan Buru, Kelurahan Lubuk Puding, Desa Tanjung Batu Kecil, dan Desa Tanjung Hutan yang berada di lingkungan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan Program Bantuan Nelayan di Kelurahan Buru, untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kekurangan dari Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) dalam peran nya sebagai utusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Sumber data ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder : Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. Data skunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang mendukung kelengkapan data primer.

Teknik Pengumpulan data di peroleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus hingga data tersebut jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : Metode Observasi, Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

Informan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang secara faktual (Meleong, 2012:132). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP), Lurah, Masyarakat Dan Nelayan yang berada di lingkungan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun. Teknik Analisis Data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar penelitian untuk membuat kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2016 : 405- 412).

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu : a. Reduksi Data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. b. Penyajian Data Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya. c. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang dilakukan Oleh UPTP Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Nelayan. Apa yang menjadi dampak minimnya jumlah masyarakat nelayan yang tidak memperoleh bantuan dari program bantuan nelayan ?

Untuk itu, peneliti menggunakan Teori peneliti menggunakan teori Cook dan Macaulay,2009, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut :

### 1. Authority (Kewenangan)

Kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik. Kewenangan masyarakat yang dimaksud dalam merubah pendirian ataupun semangat yang berkaitan dengan etos kerja adalah merupakan masyarakat nelayan yang berada dilingkungan Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun melalui pemberdayaan dalam pelaksanaan program bantuan nelayan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru.

Untuk memastikan bahwa terdapat kebenaran dari hasil observasi, maka peneliti pun melakukan wawancara kepada informan, yakni pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru terkait dengan Pelaksanaan Program Bantuan Nelayan : “Melalui Program Bantuan Nelayan ini, tentunya dengan memberikan peluang untuk masyarakat dalam permintaan atas bantuan yang mereka inginkan semisalnya jenis sampan atau perahu dan jugs alat tangkap ikan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru bahwa melalui program bantuan nelayan, UPTP memberikan kewenangan kepada masyarakat nelayan dengan memberi peluang permintaan sesuai yang nelayan inginkan seperti dalam bentuk perahu/sampan kayu, Boat, dan jenis alat tangkap ikan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala UPTP Kecamatan Buru mengatakan bahwa, dengan diselenggarakannya Program Bantuan Nelayan terlihat dimana berjalannya tugas dan fungsi UPTP dalam memberdayakan masyarakat nelayan sehingga dapat di artikan Program Bantuan Nelayan adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan sebagai manifestasi dari perhatian(atensi) Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kelurahan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Dan juga memberikan kewenangan kepada masyarakat nelayan melalui hak dalam permintaan, hal ini diharapkan agar masyarakat nelayan kedepannya bisa merasakan perubahan yang lebih baik. Berikut dibawah ini daftar nama-nama beserta masyarakat nelayan Kelurahan Buru yang telah menerima bantuan dari Program Bantuan Nelayan yang telah terealisasikan di lingkungan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

**Tabel 3. Rekapitulasi Masyarakat Nelayan Kelurahan Buru yang menerima Bantuan Nelayan di Kecamatan Buru Tahun 2019**

No	Nama	Kelurahan	Jenis Bantuan	Jumlah	Kelompok/BH
1	Joni	Buru	Sampan Ketinting Kayu	1 Unit	KUB. Rizeki Pantai
2	Harun	Buru	Sampan Ketinting Kayu	1 Unit	KUB. Rizeki Pantai
3	Erifrizal	Buru	Jaring Anak Ikan	12 Viss	KUB. Rizeki Pantai
4	Kamarudin	Buru	Jaring Anak Ikan	12 Viss	KUB. Rizeki Pantai

5	M. Yusuf	Buru	Jaring Anak Ikan	12 Viss	KUB. Rizeki Pantai
6	Hasan	Buru	Jaring Anak Ikan	12 Viss	KUB. Rizeki Pantai
7	Hermanto	Buru	Jaring Anak Ikan	12 Viss	KUB. Rizeki Pantai
8	Jumalis	Buru	Jaring Tenggiri	5 Viss	KUB. Rizeki Pantai
9	Herwanto	Buru	Jaring Tenggiri	5 Viss	KUB. Rizeki Pantai
10	Kasman dan Suhardi	Buru	Boot Pancung 15 PK	1 Unit	KUB. Rizeki Pantai
11	Saru dan Ali	Buru	Boot Pancung 40 PK	1 Unit	KUB. Nelayan Buru

**Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP)**

Dengan ini peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan kewenangan dalam merubah pendirian semangat etos kerja (*authority*) dalam pemberdayaan sebagai manifestasi dari atensi melalui pelaksanaan Program Bantuan Nelayan ini hanya untuk masyarakat nelayan semata, yang dalam artian dimana atensi UPTP terhadap masyarakat nelayan adalah mensejahterkan masyarakat di sektor perikanan sehingga para nelayan merasakan dampak atas perubahan yang lebih baik, berkaitan dengan kebutuhan dari masing-masing kebutuhan nelayan.

## **2. Confidence and Competence (Percaya diri)**

Menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan, Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru merealisasikan pemberdayaan sebagai manifestasi dari atensi melalui Program Bantuan Nelayan yang dimana berupaya menimbulkan rasa percaya diri guna merubah keadaan. Program Bantuan Nelayan adalah salah satu program pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, dengan demikian pula bertujuan dalam mengembangkan potensi nelayan guna mensejahterkan masyarakat nelayan.

Berdasarkan wawancara yang di kemukakan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru mengatakan bahwa :“Dengan meningkatkan kualitas masyrakat nelayan tentunya dengan melalui program bantuan ini, kami selaku pelaksane teknis ingin para nelayan memiliki kualitas yang lebih dari sebelumnya dengan memanfaatkan fasilitas yang didapati melalui program bantuan nelayan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu perwakilan masyarakat nelayan yang tidak menerima bantuan yakni yang di kemukakan oleh Bapak Zainuddin, dengan adanya Program Bantuan Nelayan yang di selenggarakan oleh UPTP sangat bermanfaat bagi nelayan. Namun yang menjadi permasalahan masih ada masyarakat nelayan yang tidak menerima bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki kelompok, selain itu juga terdapat masyarakat nelayan yang memiliki kelompok namun tidak pernah mendapatkan bantuan, dalam hal ini paling tidak adanya alternatif yang diberi untuk masyarakat nelayan yang tidak memiliki Kelompok sehingga semua bisa merasa atas sebuah keadilan dalam pelaksanaan Program Bantuan Nelayan ini. Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas untuk upaya dalam meningkatkan kualitas nelayan melalui

Program Bantuan Nelayan adalah kondisi nelayan yang berubah jauh lebih baik dan juga masyarakat merasa terbantu dalam aktivitasnya sebagai nelayan.

Selain dampak positif yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) melalui Pelaksanaan Program Bantuan Nelayan untuk masyarakat yang bekerja disektor Perikanan di Kelurahan Buru juga terdapat dampak negatif yang diterima oleh UPTP, ini tentunya akan membuka kondisi ruang sosial yang memicu akan terjadinya konflik sosial. Hal ini disebabkan oleh ketentuan sebagai penerima bantuan dari Program Bantuan Nelayan yang umumnya berakibat fatal dari pihak-pihak yang terimplikasi didalamnya. Program Bantuan Nelayan ini juga berpotensi dapat memicu kecemburuan sosial antara satu wilayah/kelurahan ataupun desa yang mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Nelayan dengan kelurahan ataupun desa lainnya.

### **3. Trust (Keyakinan)**

Menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya. Program Bantuan Nelayan memiliki prospek dalam keyakinan atas potensi yang dimiliki masyarakat nelayan mampu akan sebuah perubahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru mengatakan bahwa : “Dengan di terimanya fasilitas bantuan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing masyarakat nelayan, tentunya itu secara langsung menimbulkan keyakinan bahwa mereka harus bisa merubah keadaanya dek, tentunya dengan mereka terbantu, pasti mereka bersemangat dalam bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPT, bahwa langkah dalam meningkatkan kualitas masyarakat nelayan adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka melalui pemberdayaan dalam pelaksanaan program bantuan nelayan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat nelayan yang menerima bantuan dari Program Bantuan Nelayan, mereka sangat senang atas bantuan yang diberikan, dan juga sangat berterimakasih atas atensi yang diberikan oleh UPTP dalam pemberdayaan sebagai manifestasi dari atensi melalui Program Bantuan Nelayan yang memberi dampak besar terhadap potensi keyakinan atas perubahan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas untuk menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya melalui Program Bantuan Nelayan di Kelurahan Buru ini secara langsung terdapat perubahannya. Dengan adanya sarana kebutuhan yang didapat menimbulkan semangat dan kepercayaan penuh bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, karena mereka merasa perubahan yang sebelumnya mengalami kesulitan dan akhirnya mengalami kemudahan dalam proses penangkapan ikan. Dapat disimpulkan dengan adanya sarana fasilitas nelayan dapat memberikan inisiatif bagi setiap personal diri masyarakat nelayan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah didapat guna mencapai perubahan untuk kedepannya.

Dalam pelestarian kesinabungan prasarana dan sarana yang telah di peroleh melalui Program Bantuan Nelayan, perlu adanya pemeliharaan secara optimal antara masyarakat yang menerima bantuan dengan pihak yang terimplikasi, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP). Hal ini sangat penting agar tercapainya tujuan berikut ini, antara lain :

Adanya jaminan bahwa dengan diperolehnya sarana fasilitas nelayan, bisa menjadi pemicu atas perkembangan dalam proses nelayan, memenuhi tugas dan fungsi UPTP dalam segi pengawasan, meningkatkan persfektif dari masyarakat nelayan terhadap UPTP berkaitan dengan tingkat atensi terhadap masyarakat nelayan itu besar, munculnya hubungan yang erat, humoris antara UPTP dan masyarakat nelayan.

#### **4. *Oppurtunities* (Kesempatan)**

Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Dalam memberikan kesempatan pada masyarakat khususnya di sektor perikanan, hal ini di selenggarakan melalui Program Bantuan Nelayan oleh Unit Pelaksana Teknis Perikanan guna mewujudkan dalam hal apa yang menjadi keinginan bagi setiap nelayan sehingga memudahkan mereka dalam proses pengembangan diri melalui potensi dari personal individual masing-masing. Untuk memastikan observasi tersebut, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang memegang peranan penting terhadap terselenggaranya bantuan, melalui Program Bantuan Nelayan di Kecamatan Buru khususnya di lingkungan Kelurahan Buru, ibu Jusmida Tiurlan selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan keinginan dari masyarakat itu saye rase sudah terpenuhi tentunya dengan melalui penyelenggaraan Program Bantuan Nelayan, namun, untuk kondisi dilapangan terkait dengan perkembangan masyarakat nelayan yang telah menerima bantuan, sejauh ini cukup berkembang, dimana masyarakat sudah mengalami kemudahan semisal dalam aktivitas operasinya nelayan, dengan memiliki fasilitas seperti sampan ketinting yang telah di dapat melalui bantuan, selain itu jugs seperti proses penangkapan, fasilitas yang didapat ialah alah tangkap seperti jaring anak ikan, jaring tenggiri, dan jaring talang, nah kalau untuk keluhan dari masyarat yang menerime bantuan, itu hanye sebagian kecil nelayan saje, itu pun menjadi keluhan berkaitan dengan kualitas terhadap fasilitas yang di terime nye, seperti jaring yang mudah koyak. Nah kalau untuk menanggapi permasalahan seperti itu, sikap yang kami ambil tentunya berupe solusi, jadi semisal kami mencobe memberikan fasilitas ganti, sehingge masalah tersebut teratasi”.

Hasil wawancara diatas ditemukan pernyataan bahwa dari Kepala UPTP dan pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru pada Program Bantuan Nelayan di Kelurahan Buru berkaitan dengan memenuhi kesempatan masyarakat nelayan dalam hal yang mereka inginkan itu sudah terpenuhi melalui bantuan yang diterima, kemudian perkembangan dari setiap nelayan yang menerima bantuan tersebut tentunya sudah berkembang, namun terdapat permasalahan, berkaitan dengan fasilitas yang dirima, dan juga berkaitan dengan sikap yang diambil dari UPTP terkait permasalahan itu adalah memberikan solusi dengan memberikan fasilitas ganti yang sebelumnya menjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas terkait dengan memberi kesempatan, perkembangan dan juga pemecahan masalah dalam hasil pelaksanaan Program Bantuan Nelayan sangat baik, dapat disimpulkan bahwa UPTP sudah sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat di sektor perikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat atensi UPTP terhadap masyarakat nelayan melalui pemberdayaan yang merupakan manifestasi dari atensi itu cukup baik.

#### **5. *Responsibilities* (Tanggung Jawab)**

Dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik. Program Bantuan Nelayan yang di selenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTP) bertujuan guna memenuhi tugas dan fungsinya sebagai UPTP dalam pemberdayaan yang merupakan manivestasi dari atensi. Terselenggaranya program bantuan tentu perlu adanya pengelolaan terhadap apa yang di berdayakan, sehingga dapat merubah keadaan agar lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak UPT Bapak Hendrik, mengatakan bahwa : “ Tentunya melalui pengawasan dek dengan masyarakat nelayan yang dah menerime bantuan, itu kami lakukan secare langsung melalui pendekatan, karne memang kami sebagai UPT hanye memantau, sehingge menjadi laporan UPT ke Dinas Perikanan”. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Hendrik selaku Pihak Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) bahwa berkaitan dengan tanggung jawab pihak UPTP melalui pengawasan, sehingga hasil dari pemantauan nantinya akan menjadi laporan pertanggung jawaban ke Dinas Perikanan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab UPTP sudah baik, karena adanya pengelolaan, yang dimana merupakan suatu proses dalam memberikan pengawasan terhadap masyarakat nelayan yang telah menerima bantuan guna untuk mencapai tujuan. Hal serupa disampaikan oleh Kepala UPTP menyatakan : "berkaitan dengan pengawasan UPTP memiliki Fasilitator, tentunya ada pengawasan dari UPTP yang dilakukan oleh fasilitator lapangan, untuk kondisi masyarakat yang telah menerima bantuan dalam pengelolaannya tentu di pantau oleh fasilitator, inilah yang akan menjadi pertanggung jawaban kami sebagai laporan ke Dinas Perikanan". Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTP bahwa untuk pertanggung jawaban tentunya melalui pengawasan dari UPTP, melalui fasilitator lapangan. Sehingga terkait dengan kondisi pengelolaan itu akan tetap diawasi dan menjadi laporan pertanggung jawaban ke Dinas Perikanan.

### **6. Support (Mendukung)**

Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor. Nelayan dilingkungan Kelurahan Buru dapat dikatakan sebagai yang terbanyak dalam konteks pekerjaan. Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak agar menjadikan kondisi nelayan itu lebih baik. Program Bantuan Nelayan dapat diartikan sebagai bentuk suport dari pemerintah, tidak terlepas dari itu tentunya juga nelayan membutuhkan dukungan dari elemen yang lain diantaranya adalah masyarakat dan dunia usaha (Stakeholder).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak UPTP mengatakan : "tentunya Program Bantuan Nelayan inilah yang menjadi suport kami sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami berharap dengan diadegan nye program bantuan ini, para nelayan bisa lebih berkembang dalam pekerjaanya".

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hilai, Suport yang diberikan terhadap para nelayan adalah dengan menampung hasil tangkap nya sebagai peran dari tauke untuk membeli hasil tangkap dari nelayan sesuai dengan harga yang di tentukan, selain itu juga terdapat suport yang diberikan berupa pinjaman untuk mereka bagi yang mengalami kesulitan ekonomi, dengan membayarnya nanti secara langsung ataupun angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk kondisi masyarakat nelayan yang berada di Kelurahan Buru itu sangat baik, yang dimana telah memiliki dukungan (suport) dari berbagai elemen diantaranya adalah Pemerintah, Masyarakat, dan Pengusaha yang berperan penuh terhadap kehidupan masyarakat nelayan agar lebih baik.

### **Analisis Output Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Program Bantuan Nelayan adalah salah satu program dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang bertujuan agar masyarakat nelayan berdaya dan mampu dalam pengelolaan sumber daya lokal disektor perikanan guna untuk meningkatkan ekonomi kebutuhan keluarga. Selain itu juga Program Bantuan Nelayan mempunyai prospek membantu dalam meningkatkan kualitas terhadap aktivitas nelayan, meningkatkan semangat dalam bekerja (etos kerja) dan juga merubah pola pikir masyarakat nelayan agar mampu dalam perubahan untuk berkembang. Program Bantuan Nelayan bukan sekedar berbicara mengenai seberapa besar bantuan yang di bagikan, atau berapa banyak anggaran yang telah dikeluarkan, akan tetapi yang terpenting dan juga yang merupakan pokok permasalahannya adalah bagaimana Program Bantuan Nelayan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan sebagai bentuk pemberdayaan dan juga merupakan bagian manifestasi dari atensi pemerintah terhadap masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa atensi UPTP terhadap masyarakat nelayan dalam pelaksanaan Program Bantuan Nelayan masih cukup baik. Namun dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang dimana adanya kecemburuan sosial di lingkungan Kelurahan Buru, yang dimana masih ada masyarakat nelayan yang tidak memiliki kelompok usaha nelayan, padahal seharusnya mereka berhak menerima bantuan dari Program Bantuan Nelayan tapi malah sebaliknya, dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada upaya yang dilakukan oleh UPTP dalam memecahkan persoalan ini. Selanjutnya berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan Program Bantuan Nelayan, yang dimana terdapat beberapa masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas nelayan yang mereka dapatkan melalui Program Bantuan Nelayan, fasilitas yang seharusnya di manfaatkan akan tetapi malah di salah gunakan dengan menjual fasilitas nelayan sebagai keuntungan, sehingga dapat dikatakan kurangnya perhatian UPTP dalam segi pengelolaan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Nelayan di Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2019, masih dinilai kurang optimal terhadap masyarakat Nelayan. Karena pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan dalam melaksanakan program bantuan nelayan itu masih terdapat tidak tepatnya sasaran bagi penerima bantuan, selain itu masih juga terdapat beberapa masyarakat yang secara fisik seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya, dan juga masih ada permasalahan-permasalahan lain seperti adanya perbedaan kuantitas terhadap masing-masing kelompok yang telah menerima bantuan, terdapat beberapa kelompok yang tidak berasal dari lingkungan yang sama, dan masih ada masyarakat nelayan yang tidak memiliki kelompok nelayan, padahal yang menjadi prioritas bagi penerima bantuan adalah mereka yang telah memiliki kelompok yang telah bebadan hukum (Akta Notaris). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan dari penelitian ini, dapat dilihat berdasarkan Indikator-indikator dibawah ini, diantaranya :

##### **1. Kewenangan (Authority)**

Dalam indikator Kewenangan melalui pelaksanaan Program Bantuan Nelayan ini hanya untuk masyarakat nelayan semata, yang dalam artian dimana Pemberdayaan yang dilakukan UPTP terhadap masyarakat nelayan adalah mensejahterkan masyarakat di sektor perikanan sehingga para nelayan merasakan dampak yang berkaitan dengan kebutuhan dari masing-masing kebutuhan.

##### **2. Rasa percaya diri/kemampuan (Confident and Competent)**

Berkaitan dengan merubah kemampuan masyarakat nelayan pada intinya mereka sangat bersyukur atas kepedulian dari UPT terhadap masyarakat nelayan yang dimana telah memberikan fasilitas yang membuat masyarakat terbantu dalam proses aktivitas nelayan yang dulu nya mengalami kesulitan dan sekarang terbantu, ini menjadi perubahan kualitas terhadap kemampuan bagi nelayan dalam hal kepemilikan bagi para nelayan yang dulu nya menggunakan perahu dan berdayung, dan sekarang tidak lagi, dan juga dulunya alat tangkap yang tidak memadai dan sekarang sudah mengalami kemudahan dalam proses penangkapan ikan.

##### **2. Keyakinan (Trust)**

Hasil dari Program Bantuan Nelayan yang diterima masyarakat nelayan berupa sampan ketinting, boat pancung, dan alat tangkap secara langsung menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah keadaan dengan fasilitas yang di peroleh berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat nelayan.

### 3. Kesempatan (Opportunities)

Melalui Program yang diselenggarakan secara langsung telah memberi kesempatan terhadap masyarakat nelayan dalam memilih apa yang menjadi keinginannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa keinginan masyarakat nelayan dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing itu telah terpenuhi.

### 5. Tanggung Jawab (Responsibility)

Adanya pengawasan UPTP terhadap masyarakat nelayan dalam pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan oleh UPTP, dengan cara pengawasan secara langsung yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing masyarakat nelayan yang telah menerima bantuan nelayan.

### 6. Dukungan (Support)

Program bantuan nelayan menjadi suport dari pemerintah, guna dalam memfasilitasi, memperhatikan, serta memberdayakan. kemudian masyarakat yang membeli hasil tangkap dari nelayan merupakan suport dari masyarakat dalam membuka usaha bagi nelayan. Selanjutnya dengan adanya pengusaha (tauke) dimana berperan dalam menampung hasil tangkap nelayan lalu memberikan bantuan pinjaman terhadap para nelayan yang merupakan suport dari pengusaha terdapat masyarakat nelayan.

## Saran

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Kecamatan Buru telah melakukan pemberdayaan melalui program bantuan nelayan yang diselenggarakan di tahun 2019. Ini merupakan suatu bentuk sikap perhatian UPTP sebagai perwakilan dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya dalam membantu para nelayan guna mensejahterakan masyarakat nelayan. Berdasarkan kesimpulan dari peneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Nelayan di Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) haruslah memperhatikan ketentuan yang ada dan juga perlu adanya upaya dalam meningkatkan perhatian terhadap masyarakat nelayan dengan memberi informasi yang lebih jelas terkait dengan program bantuan nelayan yang akan diselenggarakan melalui edukasi seperti Sosialisasi, Himbuan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kelompok dan juga bisa membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan melalui program bantuan nelayan.
- b. Menjaga hubungan kerjasama antara masyarakat nelayan dan Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) sangatlah penting agar tercapainya suatu keberhasilan dalam pemberdayaan. Maksud dalam menjaga kerjasama antara masyarakat nelayan dan UPTP itu seperti adanya upaya baik itu dari UPTP maupun masyarakat nelayan saling bantu membantu seperti dalam memasarkan hasil tangkap dan ikut dalam aktivitas nelayan.
- c. Perlu adanya peningkatan terhadap pengawasan bagi masyarakat nelayan dalam mengelola usaha nelayannya, seperti adanya pemantauan secara sembunyi yang dilakukan oleh pihak UPTP dilapangan. agar hasil dari program yang diselenggarakan dapat dikatakan berhasil berdasarkan tujuan, dan juga berpotensi dalam mencegah penyalahgunaan bantuan.

Pendeskripsian diatas tentunya bukan untuk di keluh-kesahkan sehingga menjadi apatis, akan tetapi justru harus menjadi inisiatif bagi kita bersama dalam hal memperbaiki keadaan tersebut melalui Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPTP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## V. Daftar Pustaka

### Buku-buku

Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Wastra, Pranata. Dkk. 1991. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : CSIS.

### Jurnal & Skripsi :

Abidin Zaenal. (2019) Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. [fisip.unjani.ac.id/](http://fisip.unjani.ac.id/).

Alfian, Martoyo , Endang Indri Listiani. (2014) Implementasi Program Bantuan. <https://media.neliti.com/>. Perikanan Tangkap DiKecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN. <https://media.neliti.com/>.

Amin,Mohd., Nanik Rahmawati, Rahma Syafitri. (2019) Manajemen Kehidupan Buruh Nelayan di Pulau Buru Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun (Studi Kasus Buruh Nelayan Ikan Kurau). <http://repository.umrah.ac.id/2047/>

Arumsani, Putri. (2015). Atensi. Diperoleh tanggal 22 Maret 2021 dari [Http://eprints.Undip.ac.id/](http://eprints.Undip.ac.id/)

Japisa Tommi, Adji Suradji dan Wayu Eko.(2016). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Untuk Nelayan di Kabupaten Natuna. Diperoleh tanggal 10 Februari 2021 dari : <http://repository.umrah.ac.id/2047/>

Maani Karjuni Dt. (2011)Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Vol X No.1. <https://media.neliti.com/>.

Nazaki, Kustiawan Damri. (2017). Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. 2014, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2017. <http://jurnal.umrah.ac.id/>

Rumlus Reinaldo, Johny Lumulus dan Michael Mantiri. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Diperoleh tanggal 07 Januari 2021 dari:[Http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16191/15695](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16191/15695)

Suryadi, Gede, Lulup Endah Tripalupi, I Nyoman Sujana. (2009). Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Pada Kelompok Pengolah Dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan Di Desa Bondalem. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 11. Nomor 2. [Http://ejournal.undiksha.ac.id/](http://ejournal.undiksha.ac.id/).

Tuasamu, Farah Dessy. (2019). Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu. Jurnal Acaedia Praja Volume 2 No. 1. Diperoleh tanggal 07 Januari 2021 dari : [Http://ejournal.fisip.unjani.ac.id//index.php/jurnal-academiapraja/article/view/89](http://ejournal.fisip.unjani.ac.id//index.php/jurnal-academiapraja/article/view/89)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 Tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas dan badan dilingkungan pemerintah kabupaten karimun.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Penambak Garam.

### **VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)**

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diterima dan untuk menghargai institusi atau orang-orang yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan artikel berlangsung.